



- ▶ PTSPN V Gendeng BPPI Kembangkan Riset Sistem Sensorik untuk Tingkatkan Produktif CPO di Pulau:
- ▶ Wilmar Dukung Pemror Sumatera Selatan Kendalikan Karhutla

Acara ini dihadiri Kementerian dan lembaga terkait seperti Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelangkaan, Kementerian ESDM, dan Korpri. Anggota K2, penguji laporan yang ada saat sektor kelangkaan seperti Badan Pengelola Dana Perlindungan Kelapa Sawit (BPDKS), dan akademisi. Menjadwalkan di dalam undangan Sekretaris Jenderal Suharto, Kepala Bappenas Dadi Nurdin, Inspektur Jenderal Dirjen Pdam, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertentu Negeri Moga Satriatama, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Internasional, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Yury Anggrono, Staf Khusus Bidang Perlindungan Perdagangan Internasional Bina Harbawa, serta jajaran Eselon II di lingkungan Bappenas.

"Melalui monasbi CPO ini, Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO di depan. Indonesia belum memiliki harga acuan, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia. Kini bangsa Indonesia dapat menetapkan kebijakan dari pelaku pasar jika harga acuan sudah berkembang dari negara lain tidak takut. Hal ini juga berdampak di hulu, misalnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah menandatangani monasbi terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market influence bagi dunia," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Iskandar Idris, ketua Mading Zaidi Hassan, peralagaan CPO di bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atas pulok kelapa sawit atau kelas kelapa sawit untuk melakukan transaksi komoditasnya dengan harga kompetitif.

Mengingat Zulilifi Hasan memperjelas, Pemerintah berencana akan memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diperlukannya Peraturan Rappetti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan CPO di Bursa Berjangka. Walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (voluntary).

Menyebutkan bahwa BPPB, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam menjangkau transaksi CPO.

"Pembentukan Bursa CPO ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya mendorong perdagangan CPO lokal yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha dan menggunakan perlindungan bagi masyarakat. Kesempatan ini merupakan momen yang baik karena menjadi sarana edukasi pemerintah kepada masyarakat bahwa komoditas unggulan kita yaitu CPO harus lebih didorong agar menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Dadi.

Ditid menganggotakan, perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Indonesia ini bersifat sukarela.

upaya meningkatkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kari juga mendukung UMKM pengusaha pembeli kelapa sawit lokal serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama (same level playing field) serta memiliki kelengkapan teoror yang sama karena perdagangan melalui bursa akan mempersiapkan penjual dengan pembeli," kata Nidhal.

"Sosialisme dan pelatihan ini akan dilakukan bukan saja kepada pemain besar, namun juga pemilik pabrik kelapa sawit," ungkap Didi.

Menurut Didik, saat ini sudah bergabung 35 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia.

"Ini tentunya menjadi langkah awal yang baik. Rana ini tidak jauh dari sini. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk memajukan perdagangan CPO lebih adil dan transparan," jelasnya.

Diklat juga memaparkan Bursa CPO sudah buka dua pada 23 Oktober 2023. Artinya perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka sudah terjadi secara efektif. Dengan demikian, mulai 23 Oktober 2023 nanti, sudah mulai terbentuk nilai disamping dan dengan harga yang sudah ditetapkan pada Bursa Berjangka.

³Realisasi harga CPO di seluruh pasar di reformatory Bontol, Kabupaten Bontol, Sulawesi Selatan.

pada pengaturan dan pengawasan perdagangan barangnya komoditi strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah CPO ini, Rappelt akan memeralikan dengan komoditi strategis lainnya seperti kopi, karet, kakao, dan sebagainya," urai Didi.

Wakil Ketua Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Normala mengatakan, penunjukan pemerintah kepada ICDX untuk menjadi penyelenggara Pasar Fisik CPO melalui Bursa ini tentunya adalah sebuah kepercayaan besar dari pemerintah. ICDX sebagai lumbung pangan tunggal pemerintah akan mewujudkan pasar CPO yang terpadu, wajar, dan efisien. Selain itu, ICDX juga berkecenderungan menjadi bursa yang inklusif dan menyediakan ketertarikan bagi semua pelaku pasar.

"Sudah menjadi kewajiban KIDZ untuk mengedukasi. Rana CPO sebagai brand yang terbelah, mandiri, dan transparan. Secara teknis, kita telah siap untuk penyelenggaraan pasar fink CPO ini termasuk dalam hal ini: pendaftaran, kemudian Rana CPO tentunya akan menjadi brandhouse sebagai sebuah produsen CPO terbesar di dunia dalam menjualkan harga acuan CPO dunia. Ke depan, KIDZ akan mengaktifkan semua pemangku kepentingan untuk bisa berkolaborasi dalam mengembangkan industri ini," kata Siswandi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber Sekretaris Bappenas Obyek Pembangunan, Akademisi Buntan Arifa, dan Direktur ICCS Vagondy Teta Saputra.

*Terapannya, kolaborasi bursa CPO ini tidak membedakan pelaku usaha sehingga akan banyak yang berpartisipasi ke dalam bursa. Selain itu, kolaborasi antar-kementerian dan lembaga juga harus

Dari sisi akademis, reformasi Bursa CPO adalah sinyal positif bagi perbaikan tata kelola perusahaan

³Ideanya memang pasar flik CPO berjalan berbarengan dengan berjangka. Namun institusi pemerintah Indonesia tidak membolehkan karena melanggar Undang-Undang No. 6/1996. Bahkan memukul 40000

diharapkan tetapi nilai CPO yang sesungguhnya. Hal yang tidak kalah penting, bagaimana harus membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat," jelas Butari.

Terdapat ancaman berkeadilan terjadi karena dua alasan. KDS telah memperlakukan orang

kepercayaan, transparansi dan trusted dalam melayani member. ICDD optimis dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Bursa CPO dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia dan mencapai tujuan utama pembentukan harga acuan yang dicatatkan bersama,* ungkap Yugi. **Dian**